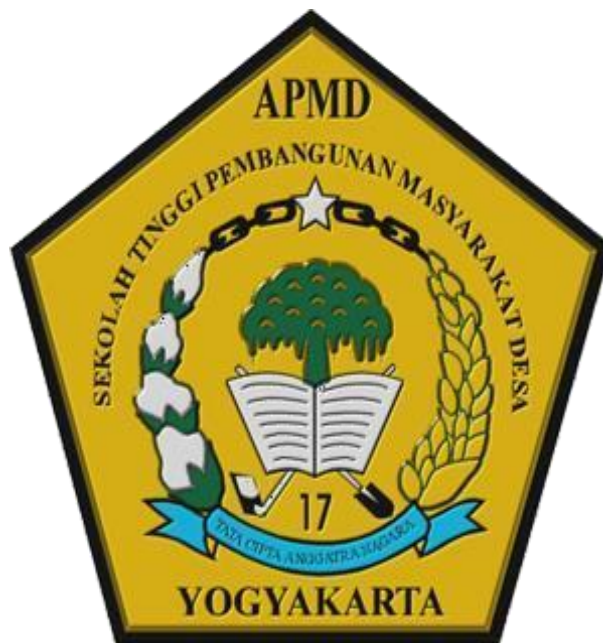


**COLLABORATIVE PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KALURAHAN NGIPAK,  
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**ANISA SEPTIANA DWI PRATIWI**

**(19520005)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**

**COLLABORATIVE PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KALURAHAN NGIPAK,  
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**

ii



## HALAMAN PENGESAHAN



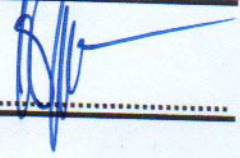
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juli 2023

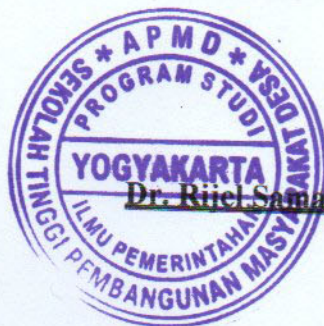
Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si Ketua/Pembimbing	
2. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si Penguji Samping I	
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Septiana Dwi Pratiwi

NIM : 19520005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul ” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2023

Penulis



Anisa Septiana Dwi Pratiwi

19520005

## MOTTO

Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan.

*(Imam Syafi'i)*

Teruslah berjuang meskipun pernah tumbang. Tetaplah tumbuh meskipun terlihat rapuh. Hidup adalah perjalanan Panjang yang tidak harus dimenangkan, yang penting terus dihadapi.

*(Sudarsono A.)*

Jangan pernah menoleh kebelakang. Tiada seorang tahu awal mula terciptanya semesta. Jangan takut masa depan, tiada yang abadi untuk selamanya. Jika sibuk dengan masa lalu atau masa depan, kau akan kehilangan hari ini.

*(Jalaluddin Rumi)*

Tidak masalah seberapa lambat anda berjalan selama anda tidak berhenti.

*(Konfusius)*

Tidak apa tidak harus sekarang, toh hidup bukan lomba lari, yang penting berusaha dan tetap optimis.

*(Anisa Septiana Dwi Pratiwi)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, serta memberikan kekuatan sehingga saya dapat bertumbuh hingga saat ini:

1. Dengan segala Rahmat Allah dan ucapan Syukur saya persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini saya masih menikmati rahmat-Nya yang tak pernah ada kata ujung.
2. Segala perjuangan saya hingga saat ini saya persembahkan pertama kepada diri saya sendiri yang telah kuat berjuang sampai detik ini walaupun harus menjalani perawatan dari dokter terutama psikiater yang saya jalani selama kurang lebih satu tahun ini yang selalu dipantau oleh dokter dan harus minum obat tiap hari dan kontrol setiap bulannya karena mengalami gangguan kesehatan mental.
3. Kedua, kepada kedua orang tua saya, terima kasih untuk bapak dan ibu tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, pengorbanan, motivasi, dan kasih sayangnya kepada saya.
4. Ketiga, kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si. Terima kasih bapak yang telah sabar membimbing saya dan memberi motivasi kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Bapak.
5. Kepada kakak saya Rengga Adi Pradana dan adik saya Vinka Risqiana Budiman, Raffi Adi Pradipta, terima kasih telah mengutkan dan menjadi motivasi saya agar tetap bertahan hidup sampai detik ini.

6. Kepada Kepala Kalurahan Ngipak beserta jajaran Perangkat Kalurahan serta Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Ngipak, terimakasih telah memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada teman-teman dan bapak-bapak yang menjadi teman diskusi saya selama mengerjakan skripsi: Mas Nugraha, Mas Benjo, Mas Teguh, Mas Pengki, Mas Kaka, Mas Yudi, Pak Edi, Mba Iova, Very Juanda, Kak Mondy, Kak Al. Dan teman seperjuangan saya pada masa kuliah Rafli, Ilham, Bowo, Anggit.
8. Terimakasih juga kepada Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan Akademik selama saya menempuh pendidikan di kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Allah Yang Maha Esa, berkat dan rahmat serta Anugrah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Collaborative Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis bukan hanya menyelesaikan sendiri, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta yang dimana mampu mempertanggung jawabkan kepada lembaga kampus yang tercinta ini.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.



4. Dosen selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dosen wali saya bapak Minardi, S.IP., M.Sc yang telah membimbing penulis dari semester awal, proses akademis hingga penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan dan memberikan banyak pengalaman.
8. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Ngipak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 07, Februari 2023

Penulis

Anisa Septiana Dwi Pratiwi

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Literatur review .....	8
F. kerangka konsep.....	16
1. Kemiskinan .....	16
2. Pemerintah Kalurahan .....	20
3. Program Keluarga Harapan (PKH).....	26
G. Fokus penelitian .....	32
H. Metode penelitian .....	33
1. Jenis penelitian .....	33
2. Unit analisis .....	34
a. Objek penelitian.....	34
b. Subjek penelitian .....	34
c. Lokasi penelitian.....	35

3. Teknik pengumpulan data.....	35
a. Wawancara.....	35
b. Observasi.....	36
c. Dokumentasi.....	36
I. Teknik analisis data .....	37
BAB II.....	39
GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGIPAK.....	39
A. Profil Kalurahan.....	39
1. Sejarah Kalurahan .....	39
2. Kondisi umum Kalurahan .....	40
a. Keadaan geografis.....	40
b. Keadaan sosial budaya .....	42
c. Keadaan ekonomi .....	43
d. Pembagian wilayah .....	44
e. Kondisi kelembagaan.....	44
1) Kondisi Pemerintah Kalurahan .....	45
2) Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	48
3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	49
4) Potensi Kalurahan .....	51
5) Potensi Sumber Daya Alam.....	51
6) Potensi Sumber Daya Manusia .....	52
7) Potensi Sumber Daya Pembangunan .....	52
8) Potensi Sumber Daya Budaya .....	53
9) Potensi Sumber Daya Kelembagaan .....	54
f. Visi misi .....	55
BAB III.....	57
ANALISIS DATA .....	57
A. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo,.....	57
B. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kalurahan Ngipak .....	71

C. Collaborative <i>Governance</i> Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul .....	102
BAB IV .....	106
KESIMPULAN DAN SARAN .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN .....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Daftar Informan .....	35
Tabel 2.1. Daftar Pamong Kalurahan Ngipak.....	47
Tabel 2.2. Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngipak .....	48
Tabel 2.3. Daftar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.....	50
Table 2.4. Potensi Sumber Daya Alam.....	51
Tabel 2.5. Potensi Sumber Daya Manusia.....	52
Table 2.6. Potensi Sumber Daya Pembangunan .....	53
Table 2.7. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya .....	54
Table 2.8. Potensi Sumber Daya Kelembagaan.....	54
Tabel 3.1. Skenario Bantuan Program Keluarga Harapan.....	59
Tabel. 3.2 Kelompok Penerima .....	60
Tabel 3.3. Pertambahan Anggota PKH.....	77
Tabel 3.4. Pengurangan Anggota PKH.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Ngipak .....	46
---	----

## INTISARI

Pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Wujudnya dapat ditemukan dalam banyak program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, terdapat pendamping PKH bernama Pak Antok yang didampingkan untuk memberikan penjelasan dan mendampingi peserta PKH di Kalurahan tersebut. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat. Namun, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan tata kelola kolaboratif dalam program ini, khususnya di Kalurahan Ngipak.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, ditemukan bahwa PKH masih terdapat ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan keluarga yang sebenarnya sangat membutuhkannya. Terutama selama masa pandemi COVID-19, jumlah keluarga miskin semakin meningkat namun bantuan yang diterima masih terbatas. Meskipun program PKH ini dapat dikatakan tepat sasaran, masih banyak keluarga yang layak mendapatkan bantuan namun belum mendapatkannya. Selain itu, PKH juga ditemukan bahwa petugas monitoring yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini mengalami kendala. Jumlah keluarga miskin yang menjadi peserta PKH terlalu banyak sehingga petugas monitoring kesulitan dalam memantau mereka dengan baik. Pada masa pandemi COVID-19 terjadi larangan berkumpul dan tatap muka sehingga tidak diadakan pertemuan antar pihak yang terlibat. Namun, saat ini petugas monitoring dan peserta sudah mulai aktif berkumpul kembali rutin setiap bulannya.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Ngipak, ditemukan bahwa collaborative governance atau tata kelola kolaboratif berjalan dengan baik. Terdapat kesadaran bersama antara pemangku kepentingan bahwa keberhasilan program PKH membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi dalam program ini melibatkan pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Proses kolaborasi ini berjalan melalui pertemuan tatap muka pasca pandemi COVID-19 dalam rapat koordinasi dan kelompok PKH. Fasilitator memainkan peran penting sebagai mediator dalam musyawarah, dan terdapat saling kepercayaan antara semua pihak yang terlibat untuk menjalankan kolaborasi ini dengan sukses. Meskipun menghadapi beberapa kendala, upaya untuk mengoptimalkan kolaborasi tetap dilakukan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru.

Di Indonesia ada daerah yang juga memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sebesar 11,91 persen, disusul Jawa Tengah 11,25 persen, dan Jawa Timur 10,59 persen. Sementara itu, dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat data sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota D.I.Y

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Kulonprogo	21,39	20,64	21,40	20,30	20,03
Bantul	16,48	15,89	16,33	14,55	14,07
Gunungkidul	21,70	20,83	21,73	19,34	18,65
Sleman	9,68	9,50	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	8,82	8,67	8,75	7,70	7,64

*Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023*



Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari semua kabupaten yang ada di Provinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi dari tahun 2017-2019. Angka kemiskinan di Gunungkidul tahun 2020-2021 mengalami penurunan angka kemiskinan dari sebelumnya yang menduduki angka kemiskinan tertinggi di DIY. Saat ini tercatat sebanyak 135.330 warga Gunungkidul yang masuk kategori miskin.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan non pemerintah. Wujudnya dalam banyak program pengentasan kemiskinan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program pengentasan kemiskinan. Berbagai alokasi anggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk program-program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya berfokus pada bantuan masyarakat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satunya yang langsung berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai program keluarga harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan. PKH akan memberikan bantuan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi.

Program Keluarga Harapan (PKH), dianggap sebagai program yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana dalam survey yang menyebutkan bahwa “PKH merupakan satu-satunya program yang memiliki indeks efisiensi dalam penurunan derajat kemiskinan yang signifikan. Program tersebut dilakukan, untuk menunjang percepatan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis, adil dan Makmur.

PKH selalu diupayakan untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat setiap tahun sejak pertama diluncurkan pada tahun 2007. Hingga tahun 2021 usia PKH menginjak 14 tahun, jumlah penerima PKH sebanyak 12.841.270 keluarga. Hal ini meningkat tajam dibanding pada tahun 2007 yakni hanya sebanyak 387.947 keluarga. Dengan merawat ibu hamil, balita dan meningkatkan nutrisi mereka, kemudian mengantarkan anak-anak ke bangku pendidikan, diharapkan akan berdampak jangka panjang terhadap pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi.

Salah satu Kalurahan yang mendapatkan alokasi dana bantuan keluarga harapan tersebut adalah Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul yang berjumlah 1.300 keluarga (KK), sebanyak 900 KK mendapatkan bantuan keluarga miskin dari pemerintah. Dari beberapa bantuan pemerintah tersebut, salah satunya adalah bantuan PKH. Program

PKH di Kalurahan ini sudah ada sejak tahun 2015 dengan jumlah KK sebelumnya adalah sekitar 104 KK. Namun karena terjadinya KK yang mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis bantuan pemerintah, maka pada tahun 2020 jumlah KK yang menerima PKH menjadi berkurang. Keluarga harapan ini ditujukan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas, kemudian untuk lansia serta masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah dari total penduduk sebanyak 1.300 KK, sebanyak 900 KK mendapatkan bantuan subsidi pemerintah salah satunya adalah PKH. Padahal yang terlihat selama pengamatan pra penelitian adalah banyak para peserta PKH yang dianggap dalam kondisi tidak miskin jika dilihat berdasarkan kriteria rumah peserta penerima manfaat.

Permasalahan berikutnya, mengenai penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Ngipak adalah merujuk pada identifikasi isu strategis pada RPJMDes dan masih terdapatnya identifikasi masalah terkait penurunan kemiskinan di Kalurahan Ngipak semakin disorot masyarakat. Salah satunya, belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah, dan belum adanya keterpaduan antar SKPD dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur sehingga program-program dan penanganan kemiskinan seperti PKH yang diupayakan sehingga belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut menegaskan, bahwa permasalahan tingkat kemiskinan juga memerlukan kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergi, masalah kemiskinan akan melahirkan permasalahan baru. Masalah sosial,

ekonomi, dan politik bisa menjadi masalah lanjutan dari masalah kemiskinan. Terlaksananya sinergitas program dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul terutama di Kalurahan Ngipak.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang membutuhkan kajian *collaborative governance*, mengingat PKH adalah program yang diarahkan untuk menjadi *Episentrum Center Of Excellence* atau penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Sehingga *Collaborative Governance* pada Program Keluarga Harapan perlu dan harus dilakukan. *Collaborative governance* adalah tata kelola yang mencakup multipartner pemerintah, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, masyarakat, serta pengaturan gabungan. Dengan adanya PKH, harapannya mampu membantu rumah tangga miskin agar dapat terbantu beban pengeluarannya dan dapat memberdayakan hidupnya sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup.

Akan tetapi, di lapangan masih terdapat temuan masalah dimana dalam penelitian yang difokuskan pada pelaksanaan PKH di Kalurahan Ngipak dalam pelaksanaan PKH masih terdapat beberapa masalah seperti belum terpadunya data antara Pemerintah Kalurahan dengan data pada Dinas Sosial. Karena komunikasi yang terbatas pada era covid-19. Selain itu, PKH dinilai belum efektif karena terdapat beberapa kekurangan dalam hal koordinasi terkait data kemiskinan di awal pelaksanaannya dan penyampaian informasi kepada keluarga penerima manfaat PKH. Dalam hal ini koordinasi Dinas Sosial dengan Pemerintah Kalurahan hingga elemen RT RW juga masih perlu untuk lebih dimutakhirkan.

Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi lebih lanjut terkait bagaimana lembaga atau organisasi yang mengelola serta cara membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan semua pihak dengan penuh keharmonisan sehingga menghasilkan program yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan serta kolaborasi antar aktor yang dilakukan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan pada PKH menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) dan De Save (2007) mulai dari pelaksanaan awal serta kolaborasi sampai hasil jangka menengah kolaborasi yang dilakukan, mengingat alasan bahwa dengan adanya kolaborasi dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* yang terkoordinir dengan baik dalam PKH akan memberikan dampak menguntungkan bagi pemerintah dari segi anggaran, jejaring kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Sehingga PKH dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Collaborative Governance Pelaksanaan Dalam Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan dan *Collaborative Governance* Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang tertarik

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang tertarik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pegangan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang penulis peroleh dibangku perkuliahan, serta penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai literatur kepada masyarakat secara umum maupun pegiat kalurahan lainnya khususnya dalam merespon perkembangan kalurahan melalui terobosan yang dapat melahirkan inovasi baru terhadap kemajuan kalurahan dalam pelayanan publik.

## **E. Literatur Review**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kalurahan, khususnya pada inovasi pelayanan publik. Beberapa penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan. Seperti penelitian Julianty Thesa Takaredase, J. E. Kaawoan, Frans Singkoh, (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ISSN : 2337 – 5736.

Kemiskinan mencerminkan situasi dimana seseorang atau rumah tangga tidak memiliki kepemilikan dan pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Untuk mengatasi tantangan kemiskinan ini, Departemen Sosial (Depsos) meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. PKH merupakan program bantuan sosial yang ditujukan kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu, dengan syarat-syarat yang bertujuan untuk mengubah perilaku miskin. Program ini diprioritaskan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, serta anak-anak usia 0-15 tahun atau yang berusia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap manfaat dan temuan yang dapat berguna dalam pengembangan layanan, khususnya dalam Program Keluarga Harapan, untuk memerangi kemiskinan. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng telah

berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pengurangan beban pengeluaran dan menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah responsif dari pemerintah, PKH diKalurahanin untuk membantu rumah tangga yang berada dalam kondisi sangat miskin dengan memberikan bantuan sosial yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku yang menghambat kemampuan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. PKH diprioritaskan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil atau menyusui, serta anak-anak yang berusia 0-15 tahun atau yang berusia 15-18 tahun dan masih membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, sehingga membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, program ini juga menciptakan perubahan perilaku yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan ekonomi. Meskipun demikian, penting untuk terus mengembangkan dan memperbaiki program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan mencapai dampak yang lebih luas dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bismi Rahma Putri dan Ifdal (2023) berjudul "Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Akses Kesehatan dan Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat" bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Baru Simalanggang, khususnya dalam memberikan



akses kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta akses pendidikan bagi anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampel penelitian terdiri dari 170 KPM dari total 295 KPM yang ada di Nagari Koto Baru Simalanggang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Baru Simalanggang telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program, mulai dari penerimaan bantuan sosial hingga proses pendampingan program.

PKH telah memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan dan memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi ibu hamil dan balita, serta akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Keberhasilan ini tercapai melalui pendampingan, kegiatan kelompok, dan komitmen individu dari para peserta PKH. Selain itu, bantuan non tunai yang diberikan dalam program juga berkontribusi dalam memperkuat dorongan untuk perubahan perilaku dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan, akses kesehatan dan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat di Nagari Koto Baru Simalanggang telah meningkat secara signifikan. Melalui pendampingan yang berfokus pada kelompok dan dukungan individu, para peserta PKH dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik untuk ibu hamil dan balita. Selain itu, anak-anak usia sekolah juga mendapatkan manfaat dalam hal pendidikan melalui program ini. Bantuan non tunai yang disediakan dalam PKH juga telah membantu dalam mendorong perubahan perilaku yang lebih positif, sehingga memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan di kalangan keluarga penerima manfaat.

Riska Nasution (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, khususnya di Kapanewon Pulau Rakyat, dalam upaya penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan langkah menguraikan data yang telah diperoleh secara deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kapanewon Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, peneliti menggali informasi melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan yang telah diimplementasikan. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang memiliki pengaruh dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial ini.

Hasil penelitian menampilkan bahwa adanya percobaan yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam menganggulangi tingkatan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Asahan dari berbagai program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya. Dalam proses

penyelenggaraan strategi menanggulangi taraf kemiskinan dan pengangguran, ada beberapa jenis faktor yang berpengaruh mencakup faktor pendukung dan penghambat. Serta pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan pendekatan Internal dan Eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Inggred Raliandy Sako, Frahmawati Bumolo, Agil Bahsoan, dan Usman Moonti (2023) bertujuan untuk menganalisis dampak Program

Keluarga Harapan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tihu, Kapanewon Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal dengan P-ISSN 2407-8018 dan E-ISSN 2721-7310, serta memiliki DOI prefix 10.37905. Volume penelitian ini adalah Volume 09, (1), yang terbit pada bulan Januari 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari Program Keluarga Harapan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tihu, Kapanewon Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan berbagai metode analisis dan data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pihak terkait dalam pengembangan dan peningkatan program bantuan sosial yang lebih efektif di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode penelitian Survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada Masyarakat Kalurahan Tihu . Jumlah Penarikan Sampel dalam penelitian

ini sebesar 57 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Tihu Kapanewon Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Besaran pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat 33,2% sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Septiana Mufidah, M. Khoirul Fikri, dan M. Taufiq Abadi (2022) berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Bondansari, Kapanewon WiraKalurahan" dimuat dalam Jurnal Sahmiyya pada bulan Desember 2022, Nomor 3, Volume 2. Penelitian ini menggunakan P-ISSN : 2963-2986 dan E-ISSN : 2963-8100.

Penelitian ini mengulas mengenai kemiskinan sebagai masalah yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, setiap negara berlomba-lomba untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Namun, dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai kendala dan masalah, termasuk di antaranya adalah mengenai data penerima, penyaluran bantuan, dan adanya potensi penyelewengan pendampingan yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program Keluarga Harapan di Kalurahan Bondansari, Kapanewon WiraKalurahan, dengan harapan dapat mengidentifikasi tantangan dan masalah yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas program dan dampaknya terhadap mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi PKH di Kalurahan Bondansari Kapanewon WiraKalurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling, serta analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan membantu penerima memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu PKH mampu mendorong penerima mematuhi syarat dan kewajiban yang diberikan sebagai sarana utama proses edukasi. Namun demikian, masih ada hal lain yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PKH yaitu efektivitas dari Program Keluarga Harapan telah berjalan dengan cukup baik meskipun ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya dan ketepatan sasaran sebagian penerima PKH yang mana data yang diterima dari pusat atau BPS terkadang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Baiq Rizka Milania Ulfah (2023) berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Tiwugalih, Kota Praya." Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Binapatria pada Volume 17, Nomor 6, yang terbit pada bulan Januari 2023.

Penelitian ini berfokus pada mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tiwugalih, Kota Praya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, yang disebarikan kepada 94 responden dari masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengevaluasi sejauh mana dampak program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas program PKH dan memberikan

masukannya berharga bagi pihak terkait dalam pengembangan program bantuan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Alat analisis dalam penelitian menggunakan regresi linier sederhana. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat PKH di Kelurahan Tiwugalih Kota Praya, hal tersebut di lihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung (7.308) > t tabel (1.986) dan nilai sign. hitung (0.00) < sign. 0.05.

Penelitian ketujuh, Ranggi Ade Febrian (2016) *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan PerKalurahan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Penelitian ini mendeskripsikan proses kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai tiga dimensi *Collaborative Governance* yaitu *system context*, *drivers*, dan dinamika kolaborasi. Tiga Dimensi *Collaborative Governance* oleh Stephan Balogh (2011) dijadikan landasan analisis oleh penulis untuk memaparkan kolaborasi pemerintah dalam pembangunan kawasan perKalurahan yang substansinya memerlukan keterlibatan beberapa pihak bukan hanya pemerintah Kalurahan untuk percepatan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Penelitian kedelapan, Devi Arianti dan Lena Satlita (2018) *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Penelitian ini mendeskripsikan proses

kolaborasi yang dilakukan pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan dengan konsep agro silvo fishery. Konsep ini merupakan salah satu usaha yang mempunyai tujuan ganda yaitu ekologi dan ekonomi. Secara ekologi melaksanakan konservasi mangrove dan usaha peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pertanian dan perikanan. - Penelitian ini, peneliti menggunakan indikator proses *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yaitu: (1) *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka), (2) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), (3) *Commitment to Process* (Komitmen Bersama), (4) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama), dan (5) *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Kemiskinan**

Penelitian ini menyoroti kompleksitas konsep kemiskinan sebagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan di seluruh dunia. Kemiskinan menandakan kurangnya tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Pendekatan tradisional dalam mengukur kesejahteraan cenderung berfokus pada kepemilikan barang, sehingga mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang mencukupi untuk mencapai ambang batas minimal dari kategori sejahtera. Meskipun demikian, pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang dan melampaui sekadar aspek materiil, mengakui peran faktor sosial, kultural, dan akses terhadap layanan publik dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mengacu pada kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Definisi lain yang diberikan oleh Supriatna (2000) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang melibatkan keterbatasan yang tidak diinginkan dan terjadi bukan atas kemauan individu yang bersangkutan. Kemiskinan dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang minim, pendapatan yang kurang, masalah kesehatan dan gizi, serta tingkat kesejahteraan hidup yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Selain itu, ada pandangan lain yang mengategorikan penduduk sebagai miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, yang nilai batasannya bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Perbedaan dalam lokasi dan standar kebutuhan hidup juga menyebabkan variasi dalam nilai garis kemiskinan yang diterapkan.

Kelompok penduduk miskin umumnya terdiri dari individu yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pemulung, gelandangan, pengemis, hingga pengangguran, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kelompok ini sering menghadapi berbagai permasalahan yang terus berlanjut jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemerintah harus tetap berkomitmen dan konsisten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, tanpa meninggalkan masyarakat miskin dan didasarkan pada



prinsip-prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Selain menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah juga harus memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan akses terhadap layanan publik yang merata. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memastikan kebijakan yang diterapkan tidak meninggalkan kelompok miskin di belakang, melainkan memberdayakan mereka untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan negara. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dan terwujud masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Kemiskinan memiliki beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi. Kartasmita (1993) menyatakan bahwa masyarakat miskin cenderung memiliki ciri-ciri lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas dalam akses terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan mereka semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Dengan keterbatasan tersebut, kelompok masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan dalam mengembangkan

usaha dan mencari peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

Kemampuan berusaha yang rendah dan keterbatasan dalam akses kegiatan ekonomi juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Masyarakat miskin seringkali kesulitan untuk mengubah situasi ekonomi mereka karena keterbatasan sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih beruntung semakin memperlebar. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan keterampilan dan akses mereka dalam kegiatan ekonomi sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Soemardjan dalam Kadji (2015) menggambarkan berbagai cara pengukuran kemiskinan yang berbeda, namun semuanya tetap memperhatikan dua kategori utama kemiskinan. Pertama, ada kemiskinan *absolut* yang menggambarkan kondisi di mana pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan *absolut* mengacu pada ambang batas minimal untuk mencapai taraf kesejahteraan yang layak.

Sementara itu, yang kedua adalah kemiskinan relatif, yang melakukan perhitungan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan di suatu daerah. Dalam pengukuran kemiskinan relatif, tingkat kemiskinan diukur relatif terhadap pendapatan rata-rata atau median dalam masyarakat atau wilayah tertentu.

Pendekatan ini mempertimbangkan sejauh mana pendapatan seseorang atau keluarga berada di bawah rata-rata atau median, dan mengevaluasi tingkat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan relatif dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam suatu populasi. Kedua kategori kemiskinan ini penting untuk dipahami dan diukur secara akurat agar pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan kerjasama peran antara pemerintah, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehensif dari berbagai unsur yaitu pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan.

## **2. Pemerintah Kalurahan**

Pemerintah Kalurahan merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003:3) menegaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, secara vertikal Kalurahan merupakan sistem pemerintahan terendah. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah (Muhadam Labolo, 2014:18).

Menurut Sutoro Eko (2015:46) menyatakan bahwa, Kalurahan merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat

dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti kalurahan menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawa dalam tata pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah bukan berarti kalurahan merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala kalurahan bukan bawahan bupati/walikota.

Kalurahan tidak berkedudukan sebagai pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014. Kalurahan/Kalurahan memiliki hak untuk menentukan sendiri yang tepat untuk kalurahan/Kalurahan tersebut. Selain itu, juga berarti bahwa kalurahan merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah “bawah” juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. Istilah “depan” berarti bahwa kalurahan berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah kalurahan setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah Kalurahan dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa kalurahan menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan menjelaskan “Pemerintah kalurahan adalah kepala kalurahan atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Supriyanto, 2009: 24).

Pemerintah kalurahan dengan masyarakat kalurahan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan dari bagian atas keseluruhan interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Serangkaian hubungan akan pemerintah dan masyarakat merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut (*good governance*) dengan melibatkan pengambilan kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999).

Lebih dari itu, dalam konteks masyarakat Hunt dan Walker (dalam Sahid 2011: 329) menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah situasi dalam di mana semua

warga dari masyarakat bersangkutan ikut berpartisipasi secara bebas dalam bentuk interelasi sosial tanpa memandang afiliasi etnis. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban keterlibatan terkait dengan keputusan/gagasan masing-masing, baik secara langsung atau tidak langsung berupa melewati suatu lembaga perwakilan resmi untuk melakukan substitusi kepentingan yang dikemukakan. Partisipasi keseluruhan diupayakan berdasarkan keyakinan seluruh anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam hal berkumpul dan berpendapat, maupun dalam hal berkontribusi sesuai tujuan yang dicapainya. Maka dari itu, partisipasi aktif oleh masyarakat mampu mewujudkan kepercayaan untuk berperan serta dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini integritas berhubungan dengan pandangan kepercayaan politik karena sebagai instansi pemerintah membuat peraturan yang berulang kali, dan kurangnya integritas menimbulkan ketidakpercayaan untuk waktu yang lama, sehingga setiap organisasi dan peraturan juga merupakan tindakan potensial dapat menumbuhkan rasa kepercayaan.

Sementara United National Development Planning (dalam Rosidin, 2010:179) keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, antara lain: (1) Partisipasi (participation) sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara

langsung ataupun melalui institusi intermediasi. (2) Penegakan Hukum (*Rule of law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki.

Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *Good Governance* adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*). (3) Transparansi (*Transparancy*) salah satu karakteristik *Good Governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi. (4) Daya Tanggap (*Responsiveness*) sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stake holder*).

Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survei untuk

mengetahui tingkat kepuasan konsumen. (5) Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam *Good Governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat. (6) Keadilan (*equity*), melalui prinsip *Good Governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan. (7) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga domain dan *Governance* harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara monopolistic.

Tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi. (8) Akuntabilitas (*Accountability*), setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (*stake holder*), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu: akuntabilitas



organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas professional, dan akuntabilitas moral. (9) Visi Strategis (*Strategic vision*), dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *Good Governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketinggalan. Visi itu, dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Rosidin, 2010:184).

### **3. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya. Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara, dan nilai kehidupan

manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah dirubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan social, persamaan, demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang terendah.

Pemerintah Indonesia sejatinya telah merencanakan cukup banyak program. Semenjak orde reformasi dimulai, telah terjadi beberapa kali pergiliran pemerintahan mencakup Presiden, Wakil Presiden, juga DPR/MPR. Masing-masing pemerintahan pun memiliki program-program positif masing-masing. Program tersebut berusaha menopang kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Program yang diluncurkan oleh Kementrian Sosial ini fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

#### ➤ **Pengertian PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

➤ **Tujuan PKH**

Adapun tujuan PKH pada umumnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah:

- a. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- b. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
- c. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

➤ **Penerima Bantuan**

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang

harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

a. Kewajiban Penerima

Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penerima PKH, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan. Bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh para penerima, maka pendamping PKH berhak mengeluarkan sanksi. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka. Sanksi yang diterima oleh para penerima PKH bila tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut adalah Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

b. Hak Peserta PKH

Adapun hak peserta PKH antara lain:

- 1) Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.
- 2) Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin Kalurahan)
- 3) Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.

- 4) Peserta PKH diikuti sertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

➤ **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

➤ **Dasar Pelaksanaan PKH**

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:

31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.

- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.

#### **4. Collaborative Governance**

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintah atau governance yaitu disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash “*collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansell dan Gash, 2007:545) “Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif adalah jenis tata kelola di mana aktor publik dan swasta bekerja secara kolektif dengan cara yang berbeda, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk penyediaan barang publik.” (Ansell dan Gash, 2007:545). *Collaborative governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance.

Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri

melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai kerja sama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent.

*Collaborative* diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menerima akibat dan manfaat. *Collaborative Governance* muncul di era paradigma governance, di mana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Charalabidis et al., 2012: 264). Definisi dari Ansel dan Gash (2007: 5) menekankan enam kriteria.

Pertama forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan public atau manajemen public (Ansell dan Gash, 2007: 544).

## **G. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam

pelaksanaan penelitian, agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karenanya yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Collaborative pelaksanaan program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Sebagaimana penjelasan Azwar (2015: 2), yaitu fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen dalam Rahmat (2009: 2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode ini berfokus pada tindakan sosial di masyarakat yang berupa etika, pola pikir, rasionalitas maupun nilai-nilai sosial budaya. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) adalah proses penelitian dan pemahaman yang



berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial maupun masalah manusia. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 22) digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan dari hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua hal yang melekat pada unsur program PKH di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan segala hal yang terkait dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program PKH. Dalam penelitian ini perincian narasumber dapat dilihat :

**Tabel 1.2**  
Daftar Informan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Kalurahan Ngipak	1
2.	Kepala Dusun	3
3.	Pendamping PKH	2
4.	Penerima PKH	5
5.	Anggota Masyarakat Ngipak	2
6.	Rukun Tetangga/Rukun Warga	2
Total		15

*Sumber : Diolah dari data primer 2023*

c. Lokasi Penelitian

Di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Akan tetapi, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Warwick dan Lininger (1975) dalam buku *The Sample Survei : Theory and Practice* menyebutkan bahwa

terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses wawancara yaitu pewawancara, situasi wawancara, responden, dan isi pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan penulis ini merupakan wawancara berencana (*standartdized interview*) dan wawancara tidak terencana (*unstandardized-interview*). Dalam mempersiapkan wawancara berencana, pewawancara harus membuat *interview guide* yang digunakan sebagai pedoman saat melaksanakan wawancara. Sementara dalam wawancara tidak terencana, peneliti tidak harus terpaku pada sistematika daftar pertanyaan. Wawancara tidak terencana ini dilakukan oleh peneliti pada awal penelitian untuk menggali informasi dasar mengenai PKH di Gunungkidul.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan secara partisipatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan memperhatikan dan berpedoman terhadap tujuan penelitian. Manfaat penelitian dari observasi ini antara lain : (1) Peneliti dapat mengetahui ada/tidaknya kenyataan atau fakta kehidupan yang dicari dalam penelitian tersebut; (2) Peneliti dapat mengetahui kenyataan atau fakta kehidupan tersebut; (3) Peneliti dapat membuktikan konsep teori yang dibuatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari penggalian informasi. Teknik dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang didapatkan melalui media online maupun offline. Menurut Moelong (2002: 161), Dokumen ini adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dapat dipisahkan karena ada permintaan seseorang peneliti.

Sehingga, dokumen dapat berupa catatan, buku, teks, jurnal, makalah, nemo, surat notulensi rapat dan sebagainya.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasi data dan memilih yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interpretative. Menurut Patton dan Lexy J. Moeloeng dalam Sutaryo (2005:16) Data yang diperoleh dari penelitian yang dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran faktual yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Tahapan dari teknik analisis data ini, menurut Patton dan Lexy J. Moeleong (dalam Sutaryo 2005: 17) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dalam uraian dasar. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya mencakup proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, komparasi, dan interpretasi. Kesemuanya ini didalam kerangka triangulasi. Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi data (tringulasi sumber), peneliti mengumpulkan data dan menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisa. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan peneliti atau penulisan.

2. Penyajian data, yang bersifat naratif agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami sebelumnya.

Pengambilan putusan dan verifikasi, yaitu penulis berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Keabsahan data yang dianalisis dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat informasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data pengamatan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGIPAK**

#### **A. Profil Kalurahan**

##### **1. Sejarah Kalurahan**

Pada awalnya Kalurahan Ngipak merupakan bagian dari wilayah kademangan jaran mati yang dipimpin oleh Demang, Demang Mangundikoro I dan digantikan oleh Demang Mangundikoro II. Setelah Demang Mangundikoro meninggal sistem tata pemerintahan Belanda berubah dan dibentuklah Kalurahan Ngipak pada tahun 1920.

Kata Ngipak berasal dari kata "Ngi" (wingi) dan "pak" (dipapak) dalam bahasa jawa. Artinya apabila kemarin terjadi silang pendapat diantara para warga segera diselesaikan bagaimana baiknya secara musyawarah. (Dalam bahasa jawa : dipapakke). Lurah yang pertama kali memimpin Kalurahan Ngipak adalah Lurah Kertoyudo yang menjabat mulai dari tahun 1920. Pergantian jabatan Lurah selanjutnya terjadi berdasarkan keturunan. Hal ini dapat dimengerti karena pada waktu itu masih dalam suasana sistem pemerintahan kerajaan.

Setelah Lurah Kartoyudo meninggal terus digantikan oleh putranya Kertosentono. Namun kapan pemerintahannya berlangsung tidak diketahui secara jelas. Lurah Kalurahan Ngipak berikutnya adalah Padmodimejo, yang merupakan anak dari Lurah Kerto Sentono, kemudian beliau meninggal tahun 1946.

Ketika Indonesia merdeka, pengisian jabatan Lurah tidak lagi secara turun temurun, melainkan dengan sistem pilihan. Lurah pertama kali hasil pilihan rakyat adalah Lurah Sastro Wiharjo, yang menjabat Lurah Kalurahan Ngipak dari tahun

1946-1950. Lurah pilihan rakyat berikutnya adalah Lurah Ratib Ciptorudito yang menjabat dari tahun 1950-1965.

Pada tahun 1965, terjadilah pemberontakan G 30 S/PKI. Lurah Ratib Ciptorudito diganti dengan Lurah Samiyo tidak dengan pemilihan namun dengan penunjukan. Lurah Samiyo menjabat dari tahun 1965-1982. Lurah pilihan rakyat berikutnya adalah Lurah Sekar Hadiprabowo dan mulai menjabat dari tahun 1982 sampai tahun 2013. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan, maka istilah lurah diganti menjadi Kepala Kalurahan tahun 2014-2015. Kepala Kalurahan dijabat oleh Gunadi selaku Sekretaris Kalurahan sebagai Pejabat Sementara. Hal ini dikarenakan pemilihan Kepala Kalurahan masih menunggu pemilihan Kepala Kalurahan secara serentak di Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya Kepala Kalurahan pilihan rakyat yang terpilih untuk periode tahun 2015-2021 adalah Bambang Setiawan, Spd.I. Pada periode selanjutnya Bambang Setiawan, Spd.I terpilih Kembali menjabat sebagai Kepala Kalurahan selama dua periode sampai sekarang.

## 2. Kondisi Umum Kalurahan

### a. Keadaan Geografis

Kalurahan Ngipak adalah sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Ngipak terletak di sebelah barat kota Kapanewon Karangmojo sedangkan dari kota Kabupaten Wonosari terletak di sebelah timur dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Kalurahan Gedangrejo dan Ngawis (Kapanewon Karangmojo) , sebelah Selatan

Kapanewon Semanu, Sebelah Barat Kalurahan Kelor (Kapanewon Karangmojo), dan sebelah Timur Kalurahan Genjahan (Kapanewon Panjong). Dilihat dari orbitrasinya (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- 1) Dari kota Kapanewon : 1 km
- 2) Dari kota Kabupaten : 9 km
- 3) Dari kota Provinsi : 49 km
- 4) Dari Ibukota Negara : 703 km

Kalurahan Ngipak merupakan zone tengah atau zone Ledak Wonosari (Cekungan Wonosari) yang terdiri dari dataran tinggi (250-300 m dpl) yang relative datar, dengan suhu rata-rata 24<sup>0</sup>C. Hampir semua wilayah Kalurahan Ngipak merupakan daerah kering. Tanaman yang berpotensi untuk berkembang adalah tanaman semusim yaitu padi dan palawija, sedang untuk tanaman hutan rakyat adalah jati, mahoni dan akasia. Tanaman perkebunan dan buah-buahan juga berkembang cukup baik, misalnya kakao, mete, pisang, sawo, mangga, dan jambu air.

Meskipun hampir semua wilayah Kalurahan Ngipak merupakan daerah kering, namun pada realitanya sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Mereka dihadapkan dengan biaya operasional pertanian yang cukup tinggi, misalnya biaya irigasi, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Padahal kenyataannya nilai jual hasil produksinya rendah.



Berdasarkan data, luas lahan di Kalurahan Ngipak sebesar 567,2 Ha. Lahan seluas itu terbagi menjadi beberapa kepentingan sesuai untuk peruntukannya.

b. Keadaan Sosial Budaya

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang berlangsung di Kalurahan Ngipak erat kaitannya dengan sistem budaya, tatacara dan kaidah-kaidah umum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta agama/kepercayaan yang dianut penduduk.

Berbagai hal diatas akan mempengaruhi para pemuda (tokoh) masyarakat dan agama didalam menentukan pola-pola kehidupan masyarakat di Kalurahan Ngipak sehingga dapat menumbuhkan kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat Ngipak.

Bagaimanapun juga penduduk Ngipak merupakan penduduk yang sebagian besar masih berpendidikan rendah dengan mata pencaharian sebagai petani, sehingga peran tokoh masyarakat dan agama sangat penting karena mereka dianggap sebagai panutan yang diharapkan dapat melahirkan aturan-aturan dan kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, aturan-aturan dan kearifan lokal yang dikembangkan tokoh masyarakat dan agama tersebut akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk kehidupan bersama diantara mereka. Beberapa bentuk kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kehidupan bergotong-royong.

- 2) Budaya rasulan/bersih dusun.
- 3) Kerukunan dan saling hormat menghormati antar umat beragama.
- 4) Menjenguk warga yang sakit, melahirkan warga yang sakit, melahirkan, arisan, membantu warga yang hajatan, dsb.
- 5) Menghormati pada orang yang lebih tua.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi berkaitan erat dengan sumber-sumber penghasilan penduduk Ngipak yang dapat dijadikan sebagai penopang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, sebagian besar penduduk Ngipak hidup sebagai petani. Penduduk mengolah lahan pertanian yang sebagian besar tergolong lahan kering dan hanya sebagian kecil yang berupa lahan basah. Lahan kering dimanfaatkan untuk pertanian tadah hujan yang menghasilkan tanaman palawija, ketela, jagung dan padi. Lahan basah dimanfaatkan untuk pertanian sawah dengan tanaman padi. Mereka dihadapkan dengan biaya operasional pertanian yang cukup tinggi, misalnya biaya irigasi, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Padahal nilai jual hasil produksinya juga masih terbilang rendah.

Dewasa ini juga dikembangkan pemanfaatan lahan kering dengan budidaya tanaman perdagangan, misalnya tembakau, melon dan cabe. Namun masih diupayakan secara pribadi dan tidak melibatkan kelompok. Selain pertanian, penduduk juga mengembangkan peternakan. Meskipun masih dikelola secara kecil-kecilan, tetapi minimal dapat menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.

Perdagangan juga menjadi penopang ekonomi penduduk Ngipak. Beberapa penduduk baik secara pribadi maupun kelompok mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha kecil yang dikembangkan adalah pertukangan, kerajinan bambu, pembuatan makanan dan penggergajian batu kapur yang memanfaatkan potensi alam setempat yaitu ketersediaan batu putih alam. Sedangkan sebagian kecil penduduk Ngipak berprofesi sebagai PNS, baik sebagai guru, pegawai kesehatan, dan di instansi-instansi pemerintah yang lain. Yang tidak kalah penting adalah sebagian penduduk yang berusia muda banyak yang merantau ke kota-kota besar.

Selain itu, banyak digulirkan bantuan untuk masyarakat salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan). PKH menyasar keluarga miskin yang meliputi ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat, serta lanjut usia di atas 70 tahun. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, melalui pengurangan beban keluarga miskin, dan memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

d. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Ngipak secara administratif terbagi menjadi kedalam sembilan (9) padukuhan, kesembilah padukuhan tersebut adalah Ngipak, Munggur, Jetis, Coyudan 1, Coyudan 2, Dungkasi, Karangwetan, Kalangan 1, Kalangan 2. Selanjutnya Kalurahan Ngipak terbagi kedalam 2 Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT).

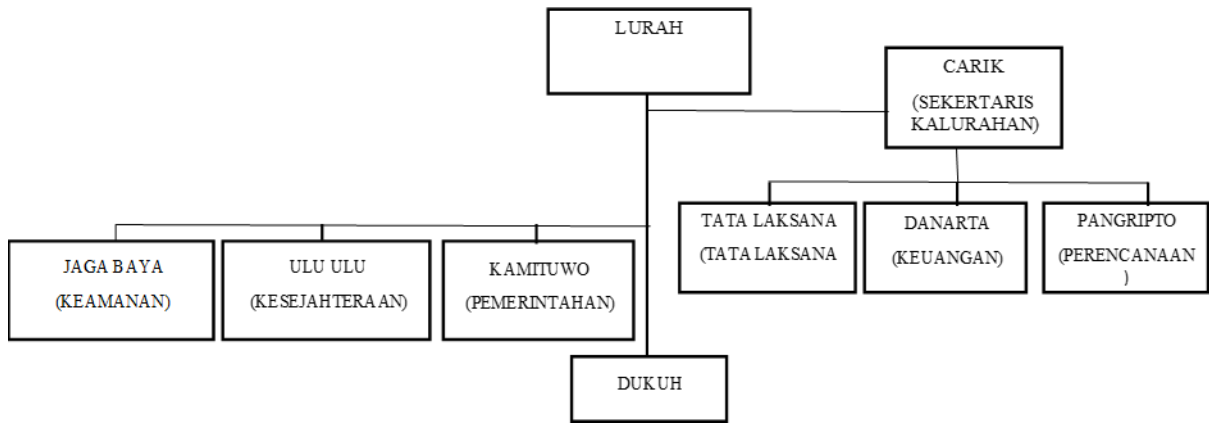
e. Kondisi Kelembagaan

1) Kondisi Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngipak dipimpin oleh seorang Lurah dan Pamong Kalurahan dibantu oleh Carik dan Pamong Kalurahan lainnya. Pamong Kalurahan sendiri terdiri dari Sekretariat, Pelaksana teknis, dan Pelaksana kewilayahan. Sedangkan di dalam sekretariat kalurahan terdiri dari tata laksana, danarta, dan pangripta. Kemudian bagian pelaksana teknis lapangan terdiri dari Jagbaya, Ulu-ulu dan Kamituwa.

Bagan Struktur dan tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Ngipak, mengacu Perhatian Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Berikut daftar Perangkat Kalurahan Ngipak sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah**  
**Kalurahan Ngipak**



*Sumber : RPJKal Kalurahan Ngipak 2020*

Sedangkan daftar Pamong Kalurahan Ngipak per 1 Maret 2022, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Daftar Pamong Kalurahan Ngipak

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Bambang Setiawan, S.Pd.I	Gunungkidul, 25-03-1986	Lurah	S1
2.	Noviantirini Suripna, S.E	Garut, 08-11-1985	Carik	S1
3.	Surahyo	Gunungkidul, 10-11-1972	Kaur Danarta	SMA
4.	Sri Rusdiyati, S.I.P	Gunungkidul, 24-03-1976	Kaur Tatalaksana	S1
5.	Yulianto, S.Pt	Gunungkidul, 27-07-1978	Kaur Pangripta	S1
6.	Nuri Widi Hartono, S.I.P	Gunungkidul, 13-02-1979	Jagabaya	S1
7.	Tika Setyaningrum, A.Md.	Gunungkidul, 13-03-1991	Ulu-Ulu	D3
8.	Patkhudin, S.I.P	Tegal, 04-02-1970	Kamituwa	S1
9.	Edi Purwanto	Gunungkidul, 01-02-1980	Dukuh Ngipak	SMA
10.	Indarto	Gunungkidul, 02-02-1981	Dukuh Munggur	SMA
11.	Wahrudin	Gunungkidul, 22-04-1974	Dukuh Coyudan 1	SMA
12.	Ngatiyar	Gunungkidul, 25-05-1975	Dukuh Coyudan 2	SMA
13.	Prayoga	Gunungkidul, 29-05-1977	Dukuh Jetis	SMA
14.	Wahana Budi Santosa	Gunungkidul, 19-03-1978	Dukuh Dungkasi	SMA
15.	Kartikaratna Wijayanti, A.Md	Gunungkidul, 11-04-1787	Dukuh Karangwetan	D3
16.	Rahmad Didik Siswanto	Gunungkidul, 18-03-1983	Dukuh Kalangan 1	SMA
17.	Yatilah	Gunungkidul, 24-08-1974	Dukuh Kalangan 2	SMA

18.	Ngadiman	Gunungkidul, 03-11-1968	Staf Pamong Kalurahan	SMA
19.	Chatarina Nursilawati	Gunungkidul, 10-04-1978	Staf Pamong Kalurahan	SMA
20.	Widodo Tri Admaji	Gunungkidul, 24-04-1983	Staf Pamong Kalurahan	SMA
21.	Fransisca Erni Kusumaningsih, S.S.	Gunungkidul, 20-07-1984	Staf Pamong Kalurahan	S1

*Sumber data: Data Aparat Pemerintah Kalurahan 2020*

## 2) Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan mitra kerja Pemerintah Kalurahan. Susunan personal Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) masa jabatan 2019-2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngipak

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Purnama, S.Pd	Bantul, 17-04-1968	Ketua	S1
2.	Sigit Saptama, S.Sos., M.M.	Bantul, 21-09-1975	Wakil Ketua	S2
3.	Sulustiyana, M.Pd.	Gunungkidul, 09-10-1970	Sekretaris	S2
4.	Kriswantoro, S.STP., M.M.	Gunungkidul, 15-04-1980	Kabid Penyelenggara Pemdes	S2
5.	Aris Budiyanto, S.Pd., M.M.	Semarang, 24-03-1973	Kabid Pembangunan dan PMD	S2
6.	Sutasdi	Gunungkidul, 16-05-1969	Anggota	SLTA

7.	Agus Satriawan, S.Ipust	Gunungkidul, 22-08- 1992	Anggota	S1
8.	Awang Marwanto	Gunungkidul, 11-03- 1982	Anggota	SLTA
9.	Tri Handayani	Gunungkidul, 07-10- 1986	Anggota	SLTA

*Sumber Data : Data Anggota Bamuskal 2020*

### 3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan bantuan dari pemerintah melalui musyawarah mufakat. Fungsinya sebagai mitra kelurahan adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. LPM memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan semangat gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan.

Tugas dan fungsi LPM mencakup beberapa hal. Pertama, lembaga ini berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan gagasan, keinginan, dan kebutuhan mereka kepada LPM, yang kemudian akan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, LPM juga berfungsi untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, dengan berfokus pada memperkokoh semangat kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Selanjutnya, LPM bertugas meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai pengawas dan pelaksana pembangunan, serta berusaha untuk memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat kelurahan berjalan dengan efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di samping itu, LPM juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan secara partisipatif.

LPM juga berfokus pada penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa serta partisipasi aktif dari masyarakat. Lembaga ini mendorong semangat swadaya dan gotong royong dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan perkembangan keluarga serta wilayah setempat. Dengan mengutamakan pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, LPM berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

**Tabel 2.3**  
Daftar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No.	Nama	Alamat
1.	Suyadi	Ngipak
2.	Supriyanta	Munggur
3.	Untoro	Coyudan 1
4.	Wastoyo	Coyudan 2
5.	Achmad Rochmana	Jetis
6.	Subarjo	Dungkasi
7.	Suhantoro	Karangwetan
8.	Samidi	Kalangan 1
9.	Cornelius Natam	Kalangan 1
10.	Runi Astuti	Karangwetan
11.	Tarida Naibaho	Kalangan 2

Sumber : RPJKal Kalurahan Ngipak 2020

4) Potensi Kalurahan

Kalurahan Ngipak memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Berikut ini potensi-potensi yang ada di Kalurahan ngipak.

5) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalurahan Ngipak terdiri dari wilayah menurut penggunaan, hasil tanam, hasil peternakan dan hasil perikanan. Dari potensi yang ada dan dengan ketersediaan lahan, diharapkan mendapat prioritas untuk pembangunan yang akan datang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Berikut ini potensi sumber daya alam :

**Table 2.4.**  
Potensi Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
<b>1.</b>	<b>Luas Wilayah Menurut Penggunaan</b>		
	Tanah sawah	82	Ha
	Tanah tegalan	150	Ha
	Pemukiman	182,9714	Ha
	Pekarangan	36,9	Ha
	Jalan	30	Ha
	Sungai	1	Ha
<b>2.</b>	<b>Tanaman</b>		
	Jagung	20	Ha
	Padi sawah	82	Ha
	Ubi kayu	10	Ha
	Kacang tanah	120	Ha
<b>3.</b>	<b>Peternakan</b>		
	Sapi	360	Ekor
	Kambing	720	Ekor

	Ayam kampung	2.200	Ekor
	Ayam boiler	20.000	Ekor
	Ayam petelur	5000	Ekor
<b>4.</b>	<b>Perikanan</b>		
	Lele	1,5	Ton/Th

*Sumber : Data Profil kalurahan Ngipak 2020*

#### 6) Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia merupakan potensi yang sangat baik untuk di data, dimana semakin baik tingkat sumber daya manusia di kalurahan, semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat di kalurahan.

Berikut ini potensi sumber daya manusia ;

**Tabel 2.5.**  
Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Penduduk	3.677	Jiwa
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	1.772	Jiwa
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	1.905	Jiwa
4.	Jumlah Keluarga	1.304	KK

*Sumber : Data Profil kalurahan Ngipak 2020*

#### 7) Potensi Sumber Daya Pembangunan

Data kondisi pembangunan dan asset yang dimiliki kalurahan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan masalah dan potensi kalurahan. Berikut ini potensi sumber daya pembangunan :

**Table 2.6.**  
Potensi Sumber Daya Pembangunan

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Asset Prasarana Umum		
	Jalan Kalurahan	2	Km
	Jalan Pemukiman	4	Km
	Jembatan	3	Unit
	Balai Kalurahan	1	Unit
	Gedung Kantor Pemerintah Kalurahan	1	Unit
	Balai Padukuhan	7	Unit
2.	Asset Prasarana Pendidikan		
	Gedung PAUD	2	Bh
	Gedung TK	3	Bh
	Gedung SD	4	Bh
	Gedung MI	1	Bh
3.	Asset Prasarana Kesehatan		
	Posyandu	9	Pos
	PKD	1	Pos
4.	Asset Prasarana Ekonomi		
	a. Bumkal	1	Lembaga
5.	Asset Prasarana Keagamaan		
	a. Masjid/Mushola	12	Unit
	b. Gereja Induk/Gereja Kegiatan	1	Unit
6.	Kelompok Usaha Ekonomi Produksi		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	247	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat	220	Kelompok

*Sumber : Data Profil kalurahan Ngipak 2020*

#### 8) Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan Ngipak masih memegang teguh tradisi kebudayaan dan melaksanakan adat tradisi. Berikut ini potensi sumber daya social budaya:

**Table 2.7.**  
Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Kerja Bakti/Gotong Royong Tingkat RT	9	Padukuhan
2.	Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW	9	padukuhan
3.	Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad	9	Padukuhan
4.	Peringatan HUT RI	9	Padukuhan
5.	Upacara Bersih Dusun/Rasul	9	Padukuhan
6.	Bersih Kalurahan	1	Kali
7.	Upacara Natal dan Paskah	1	Padukuhan
8.	Upacara Nyadran	4	Padukuhan
9.	Upacara Mitoni	9	Padukuhan
10.	Upacara Selapanan	9	Padukuhan
11.	Upacara Sepasaran	9	Padukuhan

*Sumber : Data Profil kalurahan Ngipak 2020*

9) Potensi Sumber Daya Kelembagaan

Pembangunan tingkat kalurahan tidak dapat berjalan jika hanya dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Selain dukungan dari masyarakat kalurahan, perlu adanya dukungan dari lembaga kalurahan sebagai perwakilan dari masyarakat dan mitra dari pemerintah kalurahan. Berikut ini potensi sumber daya kelembagaan :

**Table 2.8.**  
Potensi Sumber Daya Kelembagaan

No.	Uraian Sumber daya Kelembagaan	Jumlah	Satuan
1.	Bamuskal	1	Lembaga
2.	LPMK	1	Lembaga
3.	LPMP	9	Lembaga
4.	PKK Kalurahan	1	Lembaga
5.	Karangtaruna Kalurahan	1	Lembaga
6.	RT	35	RT
7.	RW	9	RW
8.	Kelompok Tani	12	Kelompok
9.	Kelompok Ternak	8	Kelompok
10.	Kelompok Wanita Tani	4	Kelompok

11.	Kelompok Seni	21	Kelompok
12.	WKSBM	9	Kelompok
13.	Usep KM	2	Kelompok

*Sumber : Data Profil kalurahan Ngipak 2020*

f. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan d/esa. Visi Kalurahan Ngipak adalah “Terciptanya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kalurahan yang adil, makmur dan sejahtera. Indikator adil, makmur dan sejahtera sebagai berikut:

a) Adil

Bahwa tata kelola pemerintahan Kalurahan didalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan wargananaaa tidak bersifat memihak pada satu golongan, tetapi semua warga tetap mendapat keadilan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran.

b) Makmur

Mewujudkan masyarakat yang aman , nyaman dan serba berkecukupan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang.

c) Sejahtera

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lestari dan harmonis dengan membangun sistem tata kelola pemerintahannya yang pelayanannya dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

## 2. Misi

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan Misi Kalurahan yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kalurahan agar tercapai Visi Kalurahan tersebut. Misi Kalurahan Ngipak adalah:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewangan lainnya.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Kalurahan yang maju dan mandiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Pelaksanaan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul sebagai berikut :

Temuan hasil analisis dari data yang diperoleh peneliti ditemukan bahwa masih mengacu pada data yang sama. Sehingga rumah tangga sangat miskin yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tidak mendapatkannya, terlebih pada saat pandemic covid-19 sedang berlangsung keluarga miskin semakin meningkat. Dengan banyaknya keluarga miskin tidak sebanding dengan bantuan yang didapatkan. Dan apabila dikatakan tepat sasaran atau tidak program PKH ini ya sudah tepat tapi masih banyak juga yang layak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH.

Selain itu, hasil temuan peneliti adalah sengan jumlah keluarga miskin petugas monitoring terpantau kualahan, tidak mampu memonitoring peserta PKH dengan baik, walaupun sudah ada pertemuan rutin setiap bulannya. Apalagi pada saat era pandemi covid-19, warga dilarang berkumpul dan tatap muka. Dan untuk sekarang petugas monitoring dan peserta sudah mulai aktif berkumpul Kembali.

2. Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Ngipak sebagai berikut :



Adanya kesadaran Bersama pemangku kepentingan bahwa PKH yang berhasil membutuhkan sinergisitas lintas sector. Adapun lembaga yang bekerjasama dalam kolaborasi ini melibatkan tiga sector yaitu pemerintah, sector bisnis, dan masyarakat.

Proses kolaborasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan melalui pertemuan tatap muka pasca covid-19 di forum rapat koordinasi dan kelompok PKH, dengan juga kepemimpinan fasilitas yang memiliki peran sebagai penengah musyawarah dan kepercayaan masing-masing stakeholder untuk menyukseskan kolaborasi. Walaupun tetap ada sedikit kendala yang dialami, akan tetapi tetap berusaha dioptimalkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) perlu dilakukan perbaikan karena penyaluran dana PKH masih belum tepat sasaran. Dalam menetapkan RTS sebaiknya digunakan data terbaru minimal di perbaharusetiap tahap penyaluran bantuan agar dana yang dikeluarkan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
2. Disarankan agar dana yang diberikan kepada peserta PKH diawasi penggunaannya dengan cermat agar tidak disalahgunakan untuk keperluan lain. Rencana pemerintah perlu didukung, yaitu untuk mengalihkan bantuan ini dari bentuk tunai menjadi non tunai dengan bekerjasama bersama lembaga perbankan, serta mendirikan warung PKH. Tujuannya adalah untuk

memudahkan pengawasan dan pemantauan, serta memastikan bahwa dana PKH disalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlahnya

3. Pendamping PKH juga perlu secara konsisten mengingatkan peserta PKH tentang kewajiban mereka untuk memenuhi komitmen dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Peserta PKH harus menyadari bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan pada akhirnya memungkinkan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
4. Perlu diperluas jangkauan kolaborasi dimana dengan melibatkan peran dari media cetak karena akses masyarakat terhadap media massa yang relatif tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. 2003, Otonomi Kalurahan. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Abdi, Supriyanto, dkk, 2009, Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan perumahan di era Otonomi Daerah, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- Azwar, S. (2015). Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baiq Rizka Milania Ulfah, 2023. Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tiwugalih Kota Praya. Jurnal Binapatria Vol.17 No.6 Januari 2023
- Bismi Rahma Putri, Ifdal, 2023. Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Akses Kesehatan Dan Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat. Jurnal Niara Vol. 15, No. 3 Januari 2023, Hal. 468-475
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023
- Charalabidis, Y., Loukis, E. N., Androutsopoulou, A., Karkaletsis, V., & Triantafillou, A. (2014). Passive crowdsourcing in government using social media. Transforming Government: People, Process and Policy, 8(2), 283–
- Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition. London: Sage Publications
- Devi Arianti, 2018. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.. Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2
- Inggred Raliandy Sako, Frahmawati Bumolo, Agil Bahsoan, Usman Moonti, 2023. Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tihu Kapanewon Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal P-ISSN 2407-8018 E-ISSN 2721-7310 DOI prefix 10.37905 Volume 09, (1), January
- Julianty Thesa Takaredase, J. E. Kaawoan, Frans Singkoh, 2019. Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. Jurnal

Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ISSN : 2337 - 5736

Kadji, Y. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik:Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo:UNG Press.

Kartasasmita Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta

Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai.

Marwick, Donald P & Lininger, Charles a.1975. The Sample Survey Theory and Practice. New York : Mc.Grawhill Book Company

Moleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : CV. Remaja

Ranggi Ade Febrina, 2016. Pembangunan Kawasan PerKalurahan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)

Riska Nasution. 2023. Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Januari 2023. E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259

Sahid, Kamarudin. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor : Ghalia Indonesia

Septiana Mufidah, M. Khoirul Fikri, M. Taufiq Abadi. 2022. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kalurahan Bondansari Kapanewon WiraKalurahan, Jurnal Sahmiyya Desember 2022 No 3 Vol 2| P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Supriatna T. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta;

Sutoro Eko, et., al., 2014. Kalurahan Membangun Indonesia, Yogyakarta, Cetakan Pertama

Utang Rosidin, 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka Setia

### **Undang-Undang**

Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## **Inpres**

Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

## **Keputusan Menteri**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



## LAMPIRAN

### 1. Panduan Wawancara :

#### Tentang Kemiskinan

- Bagaimana kriteria masyarakat di Kalurahan Ngipak dikatakan miskin?
- Bagaimana tingkat kemiskinan di Kalurahan Ngipak ?
- Dengan tingkat kemiskinan yang terjadi apakah mengalami kenaikan atau penurunan jumlah ?
- Bagaimana rencana anda untuk mengatasi angka kemiskinan tersebut?
- Dengan rencana atau program yang anda buat tersebut adakah kendala yang dialami?
- Bagaimana dengan pro dan kontra mengenai program anda tersebut?
- Bagaimana menurut anda program tersebut dikatakan tepat sasaran?
- Dengan adanya program tersebut apakah telah mengatasi angka kemiskinan yang terjadi?

#### Tentang PKH

- Bagaimana implementasi PKH di Kalurahan Ngipak, apakah sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan pusat ?
- Bagaimana pendamping PKH mengkoordinasikan program yang selama ini dilakukan?
- Bagaimana cara anda mengatasi permasalahan anggota KPM PKH agar kegiatan kegiatan pendampingan mau pun P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) bisa berjalan sesuai rencana?

- Bagaimana cara pengawasan pelaksanaan PKH?
- Bagaimana cara mengatasi masalah pengaduan adanya penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran?
- Permasalahan apa saja yang muncul selama PKH dijalankan di Kalurahan Ngipak?
- Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah cara tersebut cukup efektif?
- Dengan adanya PKH apakah telah membantu mengatasi tingkat kemiskinan di Kalurahan Ngipak?